



**EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MITRA ABADI SEJAHTERA
DESA BINAI KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN****Oleh****Masruri¹⁾ & Kartini Maharani Abdul²⁾**^{1,2}Universitas KaltaraEmail: [1masrurichan.mr@gmail.com](mailto:masrurichan.mr@gmail.com) & [2kartinimaharani92@gmail.com](mailto:kartinimaharani92@gmail.com)**Abstract**

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat menjadi wadah dan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa dari segi ekonomi khususnya. Hampir tiap-tiap desa memiliki Badan Usaha Milik Desa, yang disinyalir keberadaannya hanya sekedar “Nama” tanpa aktivitas dan tanpa pengelolaan yang jelas. Keberadaan BUMDes di Kabupaten Bulungan, yaitu salah satunya yang terletak di Desa Binai dengan Nama BUMDes Mitra Abadi Sejahtera, yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dan mencari keuntungan. Berdasarkan pada semangat awal didirikannya BUMDes di Desa Binai memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai antara lain *pertama*, meningkatkan pendapatan asli desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. *Kedua*, mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan dan tangguh dalam memberikan pelayanan kepada kebutuhan masyarakat. *ketiga*, mengentaskan kemiskinan. *Keempat*, menciptakan lapangan kerja. **Tujuan** penelitian ini untuk mengetahui Eksistensi BUMDes di Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, dan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sejauh mana manfaat yang dirasakan masyarakat setempat atas keberadaan BUMDes dimaksud serta faktor pendukung dan penghambatnya. **Metode** yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan metode analisis kualitatif, atau lazim disebut dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada Pendekatan ini penulis akan menggali dan menyajikan gambaran secara mendalam tentang kondisi nyata atau proses yang terjadi dan diteliti. Penelitian dilaksanakan di Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam pengumpulan data penulis akan mengunjungi masyarakat umum secara langsung, Pengelola BUMDes, Pemerintah Desa dan stakeholder lainnya (baik Pemerintah maupun Swasta) yang secara langsung berkaitan dan memiliki kepentingan dengan BUMDes tersebut. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kata Kunci : Eksistensi & Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Abadi Sejahtera.**PENDAHULUAN**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang didirikan dan pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat setempat dan pemerintah desa, dengan tujuan umum dalam rangka memperkuat perekonomian desa. BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi yang ada di desa, guna menjawab permasalahan yang ada

di desa juga. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*).

Salah satu dasar pendirian BUMDes adalah [1]. Tujuan akhir dari BUMDes adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat desa secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan tersebut



diperlukan langkah strategis guna mengintegrasikan potensi, baik potensi sumber daya manusia maupun potensi sumber daya lainnya. Selain itu, dibutuhkan integrasi peran dari seluruh stakeholder untuk mewujudkan pengelolaan BUMDes yang profesional, sehingga mampu mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat setempat khususnya.

Sebagaimana tertuang dalam [1] bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat yang didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, baik Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten. Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan pendampingan, sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui Pemerintah Desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial.

BUMDes di Kabupaten Bulungan, yang salah satunya terletak di Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur dengan nama BUMDes Mitra Abadi Sejahtera juga memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain *pertama*, meningkatkan pendapatan asli desa

untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. *Kedua*, mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan dan tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. *ketiga*, mengentaskan kemiskinan. *Keempat*, menciptakan lapangan kerja.

Secara teoritis dan secara normatif, konsep BUMDes sudah sangat ideal guna menjawab berbagai persoalan masyarakat desa, khususnya persoalan ekonomi di tengah kondisi keuangan negara yang dianggap minim untuk dapat memberikan pemerataan pembangunan diseluruh aspek kehidupan. Oleh karenanya konsep ideal BUMDes yang notabene di dalamnya sarat akan kegiatan pembangunan partisipatif dan pemberdayaan diharapkan dapat menjadi alternatif sekaligus untuk mendukung percepatan kerja pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara merata. Namun demikian, kondisi di lapangan berkata lain, geliat BUMDes seakan kurang tampak dalam proses pembangunan perekonomian masyarakat desa. Tentunya hal ini terjadi karena banyak faktor yang perlu diketahui dan ditemukan solusinya agar eksistensi BUMDes betul-betul memberikan dampak positif kepada masyarakat secara nyata, bukan hanya sekedar nama tanpa aktivitas dan manfaat.

Berangkat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif ketika BUMDes dapat dikelola dan berjalan dengan baik, sudah semestinya akan berdampak positif terhadap kehidupan perekonomian masyarakat desa.

Tujuan Khusus Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Eksistensi BUMDes Mitra Abadi Sejahtera di Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sejauh mana manfaat yang dirasakan masyarakat



setempat atas keberadaan BUMDes Mitra Abadi Sejahtera.

- c. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi eksistensi BUMDes Mitra Abadi Sejahtera.

Urgensi dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan formulasi praktis bagi pemerintah desa dan masyarakat desa perihal syarat terwujudnya Eksistensi BUMDes yang semestinya.
- b. Menginventarisir faktor-faktor dan permasalahan penyebab tidak berjalannya fungsi dan tidak tercapainya tujuan BUMDes secara spesifik.
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya/besarnya peran BUMDes dalam mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat desa.
- d. Sebagai referensi bagi peneliti lain dalam fokus dan kajian serupa.

LANDASAN TEORI

Pengertian Eksistensi

Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan menurut [2] “Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”. Lebih jelas [2] mengemukakan bahwa Eksistensi merupakan istilah yang diturunkan dari kosa kata Latin *existere* yang berarti lebih menonjol daripada (*stand out*), muncul, atau menjadi. Eksistensi dengan demikian berarti kemunculan, sebuah proses menjadi ada, atau menjadi, dari pada berarti kondisi mengada (*state of being*)”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi adalah suatu keberadaan yang nyata dalam mewujudkan dan mempertahankan sesuatu dengan segala bentuk dan perubahan yang dilakukan, baik secara organisatoris maupun komunitas masyarakat tertentu. Konsep eksistensi pada penelitian ini yaitu bicara bagaimana BUMDes dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang semestinya sehingga mampu memberikan dampak positif sesuai dengan maksud didirikannya. Konsep BUMDes merupakan salah satu konsep yang sangat relevan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dalam upaya peningkatan taraf kehidupan ekonominya, sehingga makna “Eksistensi” disini tidak hanya diartikan sebagai keberadaan BUMDes secara struktural organisatoris, namun lebih kepada makna fungsi dan aksi nyata yang tentunya dapat berdampak terhadap perubahan dan peningkatan kehidupan masyarakat diberbagai aspek kehidupan.

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut [3], Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes menurut [3], didirikannya BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa untuk memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang



signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan [4]. Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan Perekonomian Desa;
- b. Meningkatkan Pendapatan asli Desa;
- c. Meningkatkan Pengolahan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Dinyatakan [4] bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi

desa. Yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan pasar;
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu Media/ badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi pendorong kemajuan ekonomi desa serta pemerataan ekonomi pedesaan.

Prinsip Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (pemodal), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) Prinsip dalam mengelola BUMDes [5] yaitu:

- a. *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya
- b. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus



diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

- d. *Transparansi*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam pengelolaan BUMDes dapat ditunjang melalui implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga BUMDes diharapkan akan lebih berdaya yang disebabkan dengan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang cukup besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk kegiatan BUMDes. Jika hal ini dapat berjalan beriringan, maka akan terjadi peningkatan pendapatan asli desa (PADesa) yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*kooperatif*), membangun kebersamaan/ menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar. Inti dari prinsip pengelolaan BUMDes adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan asumsi bahwa setiap manusia (masyarakat) memiliki potensi yang berbeda-beda dan unik, melalui BUMDes inilah potensi-potensi tersebut dapat digali dan dimanfaatkan melalui kolaborasi secara sistematis guna memecahkan persoalan masyarakat dan mendukung kinerja pemerintah khususnya pemerintah desa dalam hal pembangunan diberbagai aspek kehidupan.

Studi Literatur

Menurut [6] Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Usaha dan ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing di Era masyarakat Ekonomi Asean". Desa menjadi satuan wilayah terendah dalam perangkat ketatanegaraan di Indonesia, dimana desa saat ini memasuki era baru setelah lahirnya UU Desa. Desa diharapkan dapat menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik. Terlebih dengan bergulirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi roda pembangunan desa. Terdapat dua hal penting di dalam tulisan ini, untuk menjawab eksistensi BUMDes sebagai lembaga usaha dan perekonomian desa dalam menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu: 1) BUMDes diharapkan mampu memanfaatkan konsep kawasan komoditas unggulan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa; dan 2) Agar BUMDes ini dapat berkembang dan menjadi lembaga perekonomian desa yang berdaya saing, maka perlu adanya kategorisasi tingkat perkembangannya BUMDes berdasarkan status perkembangannya, dimana kategorisasi ini dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Menurut [7] Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian masyarakat Desa Soki kecamatan Belo Kabupaten Bima". Salah satu lembaga yang akan membangun dan menopang perekonomian masyarakat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan pilar ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga social (*social institation*) dan Komersil (*commercial institation*). Berarti BUMDes merupakan lembaga playanan social masyarakat desa. Tujuan utama dari BUMDes adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, (2)



mendeskrripsikan problem Badan Usaha Milik Desa

Menurut [8] Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat”. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi kepada desa untuk membentuk BUMDes. Pembentukan BUMDes mempunyai banyak dampak positif salah satunya ialah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dari peningkatan pendapatan asli desa maka akan membuat perekonomian desa dan masyarakat menjadi kuat. BUMDes juga dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dijalankan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah eksistensi Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa di Tiyuh Candra Kencana? dan Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan serta pengelolaan BUMDes Artha Kencana? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang sudah diolah dan disajikan dalam bentuk uraian, lalu dipresentasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa eksistensi BUMDes Artha Kencana terhadap peningkatan Pendapatan Asli Tiyuh memberikan kontribusi nyata bagi Tiyuh Candra Kencana. Melalui dua unit usaha yang dijalankan yaitu simpan pinjam dan jasa pembayaran *online* terjadi peningkatan pendapatan asli tiyuh. Pada tahun 2014 pendapatan asli tiyuh sebesar Rp 12.300.000 meningkat menjadi Rp 15.000.000 ditahun 2015, mengalami peningkatan kembali ditahun 2016 menjadi Rp 17.000.000.

Pengelolaan BUMDes Artha Kencana mempunyai kendala salah satunya adalah kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola BUMDes.

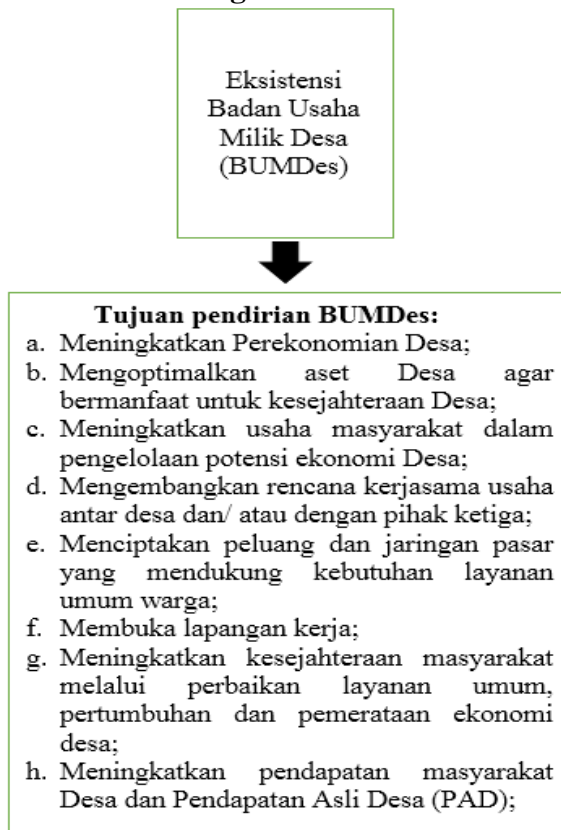
Pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes dalam mengelola dan mengoperasikan BUMDes. Pengelola BUMDes Artha Kencana diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menggambarkan skema kerangka pikir dalam penelitian ini. Menurut [10], Kerangka Pemikiran adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka Pemikiran menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel-variabel yang akan diteliti.

Berikut merupakan skema kerangka pikir yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Gambar 1. Kerangka Pikir





Sumber: Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dilihat dari objek dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Tujuan utama penelitian Deskriptif Kualitatif adalah untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial. Dalam proses penelitian kualitatif, data yang didapatkan berupa catatan yang berisikan tentang perilaku dan keadaan individu secara keseluruhan. Penelitian kualitatif menunjukkan pada prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, proses, ungkapan atau catatan orang atau tingkah laku masyarakat.

Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, penulis berusaha mengetahui secara mendetail tentang seluruh proses dan aktivitas yang berkaitan dengan Eksistensi dan pengelolaan BUMDes oleh masyarakat desa Binai.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Masyarakat umum, Pengelola BUMDes, Pemerintah Desa dan *stakeholder* lainnya (baik Pemerintah maupun Swasta) yang secara langsung berkaitan dan memiliki kepentingan dengan BUMDes. Parameter yang akan diteliti adalah Eksistensi BUMDes.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. Yang mana dalam proses penelitian dan pengumpulan data peneliti mengunjungi langsung pengelola BUMDes, masyarakat umum, pemerintah desa, pihak swasta dan *stakeholder* lainnya yang berkaitan.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian kualitatif merupakan istilah dari rumusan masalah yang terdiri atas serangkaian

pertanyaan penelitian berkaitan dengan permasalahan yang diteliti [9]. Penelitian ini difokuskan pada Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Abadi Sejahtera di Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur. Adapun fokus penelitian ini dengan memberi batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Abadi Sejahtera di Desa Binai?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi pengelolaan BUMDes Mitra Abadi Sejahtera di Desa Binai?

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dihimpun pada saat melaksanakan penelitian di lapangan seperti wawancara dan pengamatan langsung tentang realita dan kondisi nyata yang terjadi. Sedangkan data sekunder merupakan data berupa infografik seperti publikasi, laporan, dokumen, jurnal/artikel, buku-buku dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini [9].

Dalam sebuah penelitian diperlukan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data agar mendapatkan data valid dan kredibel. Berikut tiga proses yang dilakukan dalam pengumpulan data,:

1. Memasuki Lokasi Penelitian (*Getting In*).
Dalam tahap ini yang dilakukan pertama kalinya adalah berkaitan dengan administrasi surat menyurat perihal ijin penelitian kepada instansi yang berkompeten, dalam hal ini khususnya pemerintah desa. Selain itu penggalian informasi awal dapat dilakukan guna memastikan rencana penelitian berikutnya dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Ketika Berada di Lokasi Penelitian (*Getting Along*)
Dalam hal ini peneliti mulai menggali dan mengumpulkan data secara empirik pada semua pihak yang terkait, serta melakukan kroscek keakuratan data secara berjenjang.



3. Mengumpulkan Data (*Logging The Data*)
 Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut [10]:

1. Observasi merupakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
2. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya atau informan terkait penelitian dengan permasalahan yang diteliti melalui wawancara.
3. Studi Dokumentasi Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Bisa dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan mencari informasi dalam bentuk visual atau foto yang berhubungan dengan penelitian.
4. Studi Pustaka. Mempelajari dan mengkaji literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui buku-buku, artikel, karya ilmiah, media cetak dan media elektronik (internet).

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai dengan [11] yaitu :

1. Tahap pengumpulan data
2. Tahap reduksi data
3. Tahap penyajian data
4. Penarikan kesimpulan/verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Desa Binai.

Desa Binai merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kata “Binai” diambil dari

nama sebuah wilayah dipinggiran sungai yang bermuara di sungai kayan. Pada zaman dahulu, wilayah desa ini disebut dengan nama “Merangai”. Adapun arti dari kata “Merangai” adalah ketangguhan, kepandaian, kekuatan, dan kegagahan, yang merupakan ungkapan kepada seorang pemimpin yang mempunyai kekuatan yang lebih dari manusia biasa. Karena pemimpin yang Merangai sangat didambakan sehingga kata tersebut begitu populer baik bagi penduduk setempat maupun bagi pendatang. Akibat semakin banyaknya pendatang yang masuk ke Desa Binai, baik untuk menetap maupun bekerja pada akhirnya menyebabkan kata Merangai perlahan berubah menjadi Binai yang merupakan nama sungai yang melintasi pemukiman tersebut.

Pada Tahun 1999 terbentuk Rukun Tetangga yang merupakan bagian dari salah satu Rukun Tetangga Desa Pura Sajau, yaitu salah satu desa yang berdekatan dengan Desa Binai. Dari waktu ke waktu pertambahan jumlah penduduknya terus mengalami peningkatan, hingga dalam kurun waktu beberapa tahun kemudian menjadi sebuah Dusun.

Untuk pertama kalinya Kepala Dusun dijabat oleh Ambo Bilung, yaitu sejak Tahun 2001 – 2005. Sampai akhirnya pada tahun 2005 melalui rangkaian proses tertentu, dari dusun itulah terbentuk sebuah desa definitif yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2005, nama desa tersebut adalah Desa Binai. Adapun roda pemerintahan desa untuk sementara dipimpin oleh Penjabat Sementara (PJS) atas nama Apui Ngau yang menjabat sejak tahun 2005 hingga tahun 2007. Pada tahun 2007 akhir kemudian dilantiklah Kepala Desa definitif yaitu Daniel Saul yang menjabat sampai dengan tahun 2013. Pada tahun dan periode berikutnya terpilih lagi kepala desa baru yaitu Hamsyah Djumaan dengan masa jabatan satu periode sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, kini Desa Binai dipimpin oleh Penjabat Sementara Kepala Desa, yang merupakan ASN Kantor Kecamatan Tanjung Palas Timur atas nama Try



Rubianto, S.Pd sampai dengan pemilihan kepala desa berikutnya yang akan dilaksanakan secara serentak.

1. Keadaan Demografi Desa Binai.

Desa Binai merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Tanah Kuning.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sajau.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sungai Deridu.

Berdasarkan data profil desa, Desa Binai memiliki luas wilayah kurang lebih 200 Km² dengan jumlah penduduk 2.998 jiwa yang terdiri dari 1.636 jiwa penduduk laki-laki dan 1.362 jiwa penduduk perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 744 KK. Desa Binai terdiri dari 11 RT yang di pimpin oleh seorang Ketua RT. Pusat Desa berada di RT 1,2,3,4,5, dan 6 sementara RT 7,8,9,10 dan 11 berada di perbatasan Provinsi yaitu di kilometer 56 dan kilometer 57, tepatnya di jalur menuju Kabupaten Berau Kalimantan Timur.

Penduduk Desa Binai terdiri dari beberapa suku bangsa dengan prosentase sebaran suku di Desa Binai adalah mencakup Suku Kenya (30%), Suku Bugis (30%), dan (40%) merupakan campuran suku-suku lain yang ada di Indonesia. Umumnya bahasa yang biasa digunakan oleh masyarakat di Desa Binai adalah Bahasa Indonesia.

2. Profil BUMDes Mitra Abadi Sejahtera.

a. Deskripsi Umum Lembaga

Nama Lembaga : BUMDes Mitra Abadi Sejahtera.

Dasar Hukum : SK Kepala Desa Binai No. 11 Tahun 2016.

b. Riwayat

BUMDes Mitra Abadi Sejahtera adalah Lembaga Milik Desa yang dikelola oleh Masyarakat Desa Binai, didirikan pada

Bulan Agustus 2016 dan disahkan pada tanggal 22 Agustus 2016, oleh Kepala Desa yang menjabat saat itu, yaitu Hamsyah Djumaan.

Tujuan awal didirikannya BUMDes Mitra Abadi Sejahtera adalah untuk dapat menjadi sebuah wadah bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas usahanya secara terorganisir yang siap memanfaatkan segala potensi yang ada di Desa Binai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

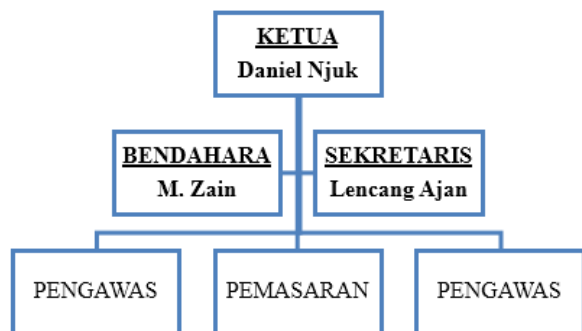
c. Visi, Misi dan Tujuan dari BUMDes Mitra Abadi Sejahtera.

1. Visi BUMDes Mitra Abadi Sejahtera:
Menjadi Badan Usaha Desa yang Mampu dalam Pengelolaan potensi desa dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkualitas, berbudaya, maju, adil, demokratis dan perduli.
2. Misi BUMDes Mitra Abadi Sejahtera:
 - a. Mengolah potensi desa agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.
 - b. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.
 - c. Peningkatan kriteria dan kapasitas SDM BUMDes untuk dapat tercapainya BUMDes yang handal dan terpercaya.
3. Tujuan BUMDes Mitra Abadi Sejahtera :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUMDes melalui kerjasama usaha.
 - b. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui kegiatan Usaha BUMDes.

d. Susunan Pengurus BUMDes Mitra Abadi Sejahtera



Gambar 2. Struktur pengurus BUMDes Mitra Abadi Sejahtera.



e. Rencana Kerja/Program Usaha

Melihat potensi dan perkembangan perekonomian serta sumber daya manusia yang ada di Desa Binai serta Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Desa, BUMDes Mitra Abadi Sejahtera menyusun rencana usaha yang memiliki potensi utama yaitu :

1. Usaha Jasa Transportasi.
 - a. Angkutan buah kelapa sawit dari lokasi perkebunan Plasma ke pabrik atau ke tempat yang telah ditentukan bersama.
 - b. Angkutan pupuk dari pelabuhan atau dari toko penyedia yang di tunjuk menuju Camp perusahaan perkebunan.
 - c. Angkutan BBM dari pangkalan atau dari tempat lain yang di tunjuk sampai ke Camp Perusahaan perkebunan.
2. Usaha Bidang Pembangunan/pertukangan.
 - a. Pembangunan mes, pos penjagaan dan lain-lain.
 - b. Pembangunan jalan dan pemeliharaan.
3. Usaha Bidang Pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.

Berupa Beras, sayuran, Ikan, daging dan sesuai kebutuhan
3. Usaha Bidang Perkebunan, seperti pembibitan dan persemaian dan sesuai kebutuhan pasar.

Pembahasan

Dalam pembahasan mengenai Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada umumnya, dan BUMDes Mitra Abadi Sejahtera khususnya, tentu hal utama yang menarik untuk dibahas dan dikupas adalah

tentang ketercapaian terhadap tujuan yang telah ditentukan. Terlebih idealnya BUMDes memang dibentuk sebagai suatu wujud keseriusan masyarakat dan pemerintah desa dalam mengkoordinasikan potensi-potensi usaha yang dapat dikembangkan melalui wadah formal. Sejatinya masyarakat secara personal mau dan mampu melakukan geliat usaha masing-masing, namun masyarakat lebih memilih untuk melakukan kegiatan usaha melalui BUMDes, ini merupakan salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa melalui BUMDes masyarakat menaruh harapan yang besar dan optimisme yang tinggi dalam usaha mengembangkan potensi secara bersama-sama dibandingkan dengan dilakukan secara sendiri-sendiri.

Tujuan pendirian BUMDes secara khusus dan spesifik tentu memiliki perbedaan antara BUMDes di suatu wilayah/desa dengan BUMDes di wilayah/desa lainnya. Namun demikian essensi dan spirit utama dari pendirian BUMDes secara umum/nasional memiliki tujuan yang sama, karena tujuan BUMDes di tiap-tiap wilayah/desa sejatinya merupakan turunan atau pelaksanaan teknis yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah desanya. Adapun tujuan umum/nasional yang dimaksud seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDDT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, khususnya Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Pendirian BUM Desa bertujuan:

1. Meningkatkan Perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;



5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD);

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator tujuan tersebut untuk membahas eksistensi/keberadaan BUMDes Mitra Abadi Sejahtera guna mengetahui lebih dalam apakah keberadaan atau eksistensi BUMDes Mitra Abadi Sejahtera dapat memberikan manfaat khususnya dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat atau tidak, dan faktor apa yang mempengaruhi. Hal ini sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Tujuan BUMDes yang pertama adalah:

1. Meningkatkan Perekonomian Desa.

Peningkatan perekonomian desa dapat dimaknai secara sederhana sebagai suatu kondisi membaiknya aktivitas ekonomi yang ditandai dengan adanya peningkatan daya beli masyarakat desa setempat. Berbicara tentang peningkatan perekonomian desa, nampaknya belum menunjukkan arah kesana. Hal ini senada dengan pernyataan PJ Kepala Desa Binai Bapak Tri Rubianto saat wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2020 yang menyatakan:

“kalau daya beli masyarakat sepertinya dari dulu ya gitu-gitu aja, tidak ada yang meningkat, paling mereka hanya belanja untuk kebutuhan primer seperti makan, kalau untuk kebutuhan lainnya sih ada momen-momennya seperti saat lebaran atau natal. Intinya ya normal-normal aja, tidak meningkat dan tidak juga menurun”.

Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa secara sederhana keberadaan BUMDes Mitra Abadi Sejahtera yang telah memasuki

tahun ke empat secara spesifik belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Hal ini juga diperkuat oleh keterangan dari Ketua BPD Desa Binai pada wawancara tanggal 02 Maret 2020 sebagai berikut:

“BUMDes Desa Binai sebenarnya memiliki konsep yang sudah sesuai dengan kondisi kita, tapi memang kita akui bahwa masalah tidak maksimalnya kegiatan karena pengelolanya ini orang-orang tua yang kurang banyak pengalaman khususnya dalam mengelola BUMDes, jadi ya seperti ini hasilnya, awal berdiri saja semangat tapi lama kelamaan ya seperti ini, harapan kedepannya bisa diperbaharui pengurusnya, kita banyak warga desa yang sudah jadi sarjana-sarjana yang bisa dilibatkan untuk mengurus BUMDes ini”.

Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa BUMDes Mitra Abadi Sejahtera secara keorganisasian memang telah terbentuk selama empat tahun, namun demikian dalam kurun waktu yang terbilang cukup lama, BUMDes Mitra Abadi Sejahtera belum dapat memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan perekonomian desa. Kondisi ini terjadi karena keberadaan BUMDes seolah hanya sekedar ada, diindikasikan tidak adanya konsep manajemen, baik manajemen perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi yang jelas dan terbakukan.

2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;

Aset desa dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat desa yang notabene memiliki kondisi kehidupan yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan masyarakat desa dapat dikatakan jauh dari kemewahan. Pemenuhan kebutuhan primer merupakan prioritas utama yang mungkin saja sangat jauh untuk melangkah ke pemenuhan kebutuhan sekunder apalagi kebutuhan tersier.



Desa dengan karakteristik masyarakatnya yang memiliki sumber daya manusia standar atau dibawah standar, harus dipicu melalui BUMDes untuk mampu menggali potensi dan aset desa yang belum difungsikan secara baik.

Adapun aset atau potensi desa yang dapat dikembangkan yaitu banyaknya tanah milik pemerintah desa yang dapat dikembangkan untuk kegiatan usaha, selain itu di wilayah Desa Binai terdapat 9 perusahaan yang aktif beroperasi, dimana peluang Desa Binai untuk mensuplay bahan-bahan pokok dan kebutuhan operasional lainnya ke perusahaan-perusahaan itu sangat terbuka lebar, namun demikian pemanfaatan potensi dan peluang desa ini belum dapat terwujud, hal ini disampaikan oleh Pj Kepala Desa Binai dalam wawancara tanggal 02 Maret 2020 berikut:

“Kita sudah mensupport pendirian BUMDes, bahkan dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut desa memberikan modal awal masing-masing sebanyak Rp. 50.000.000,- yaitu tahun 2017 lima puluh juta, dan tahun 2018 lima puluh juta, jadi totalnya Rp.100.000.000,-. Harapannya dengan kucuran dana tersebut bisa menggerakkan roda usaha BUMDes, tapi kenyataannya tidak ada geliatnya”.

Pengelolaan BUMDes dengan konsep manajemen yang jelas dan sumber daya manusia (pengelola) yang cukup memadai semestinya dapat menggerakkan roda BUMDes dengan baik, terlebih di awal berdirinya BUMDes Mitra Abadi Sejahtera, Pemerintah Desa telah mengalokasikan dana yang cukup untuk memulai aktivitas BUMDes. Namun kondisi yang terjadi seolah aktivitas yang dilakukan baik Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes tidak dilakukan secara profesional. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Pj Kepala Desa Binai pada tanggal 02 Maret 2020 yang menyatakan bahwa penggunaan dana bantuan awal yang jumlahnya Rp. 100.000.000,- tidak digunakan sesuai skala prioritas BUMDes yang dapat menunjang

aktivitas BUMDes secara keseluruhan, hal ini karena dana tersebut malah dipergunakan untuk membuat kolam ikan yang juga dibiarkan begitu saja. Semestinya BUMDes membuat rencana kerja dan membuat skala prioritas secara baik dan benar serta didokumentasikan dalam bentuk dokumen perencanaan, kemudian pasca pelaksanaan kegiatan juga harus dibuat dokumen laporan yang dilaporkan secara terbuka melalui rapat rutin yang kemudian dapat dilakukan evaluasi-evaluasi baik dari masyarakat maupun dari pemerintah desa, yang semua aktifitas mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi dilakukan secara profesional dan terdokumentasikan.

3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;

Seperti semangat awal alasan pendirian BUMDes Mitra Abadi Sejahtera dilandasi adanya kebersamaan untuk lebih meningkatkan produktivitas usaha masyarakat yang terhimpun dalam suatu wadah formal, sehingga dapat saling mengisi, melengkapi dan saling menguntungkan. Namun demikian semangat itu seolah luntur dengan sendirinya. Belum ada wujud gerakan yang menjanjikan bukti nyata bagi kehidupan masyarakat. Program usaha yang telah digagas dengan apik dan disepakati bersama masyarakat dan pengurus BUMDes serta Pemerintah Desa seolah hanya sebagai rencana di atas kertas saja. Kondisi ini terjadi karena memang tidak ada peningkatan terkait jenis usaha maupun kuantitas usaha masyarakat Desa Binai. Hal ini disampaikan oleh Ketua BUMDes Mitra Abadi Sejahtera, bapak Daniel Njuk pada wawancara tanggal 3 Maret 2020 di Desa Binai, berikut kutipan wawancaranya:

“ kami ini semangat sekali pada saat tahun 2016 membentuk BUMDes, tujuan dan konsep kerja serta rencana usahanya bagus, sesuai dengan kondisi Binai. Ada usaha angkutan, usaha pembangunan atau jasa, usaha jual beli hasil kebun dan lain-lain. Tapi sampai sekarang sudah tahun 2020 rencana-rencana usaha itu tidak berjalan”.



Penjelasan yang dapat diperoleh dari kutipan wawancara tersebut yaitu bahwa kondisi BUMDes Mitra Abadi Sejahtera tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berikut daftar nama warga/tokoh masyarakat, Pemdes yang hadir dalam Rapat Pengambilan Keputusan Tentang Penetapan Akses Usaha Desa, BUMDes Tahun 2016.

Tabel 3. Daftar hadir rapat.

NO	Nama	Jabatan	Alamat
1	Daniel Njuk	Ketua BUMDes	RT. 02 Binai
2	Lencang Jan	Sekretaris BUMDes	RT. 04 Binai
3	A Yudas Juk	Pengawas	RT. 02 Binai
4	Amos Padan	Pemasaran	RT. 02 Binai
5	Saprin	Ketua RT. 06	RT. 06 Binai
6	Hardi Iban	Ketua RT. 01	RT. 01 Binai
7	Hengki Noh	Ketua RT. 02	RT. 02 Binai
8	Lencau Jan	Pengawas	RT. 04 Binai
9	Apui Ngau	Ketua Adat Binai	RT. 02 Binai
10	M. Zain	Bendahara	RT. 05 Binai
11	Nurhaji	Ketua RT. 04	RT. 04 Binai
12	Herman A	Ketua BPD	RT. 05 Binai
13	Hamsyah DJ	Kepala Desa	RT. 04 Binai

Sumber: Olah data, 2020.

NO	Nama	Jabatan	Alamat
1	Daniel Njuk	Ketua BUMDes	RT. 02 Binai
2	Lencang Jan	Sekretaris BUMDes	RT. 04 Binai
3	A Yudas Juk	Pengawas	RT. 02 Binai
4	Amos Padan	Pemasaran	RT. 02 Binai
5	Saprin	Ketua RT. 06	RT. 06 Binai
6	Hardi Iban	Ketua RT. 01	RT. 01 Binai
7	Hengki Noh	Ketua RT. 02	RT. 02 Binai
8	Lencau Jan	Pengawas	RT. 04 Binai
9	Apui Ngau	Ketua Adat Binai	RT. 02 Binai
10	M. Zain	Bendahara	RT. 05 Binai
11	Nurhaji	Ketua RT. 04	RT. 04 Binai
12	Herman A	Ketua BPD	RT. 05 Binai
13	Hamsyah DJ	Kepala Desa	RT. 04 Binai

4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;

Inisiasi untuk membentuk kerjasama usaha dengan pihak ketiga merupakan salah satu upaya untuk lebih menguatkan BUMDes baik secara keuangan maupun hal lainnya seperti sumber daya manusia. Upaya ini telah dilakukan pengurus BUMDes dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa Binai serta meminta dukungan dan fasilitasi untuk merintis hubungan kerjasama dengan pihak perusahaan yang ada di Desa Binai. Namun dalam hal ini, harapan pengurus Badan Usaha Milik Desa Mitra Abadi Sejahtera belum terwujud karena hingga saat ini belum ada kerjasama dengan

pihak manapun, dikarenakan kurangnya dukungan nyata dari Pemerintah Desa dalam pencarian Mitra, yang menyebabkan BUMDes Mitara Abadi Sejahtera tidak berkembang. Wawancara dengan pengurus/sekretaris BUMDes, Lencang Ajan pada tanggal 03 Maret 2020 sebagai berikut:

Kita sudah minta ke desa agar di fasilitasi ke perusahaan, jawabnya iya terus. Saat kami berkunjung ke perusahaan, perusahaan sebenarnya mau bekerjasama, perusahaan minta agar dokumen-dokumen pendirian BUMDes dilengkapi, tapi sampai saat ini pihak desa tidak juga melengkapinya”.

5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

Peluang usaha dan jaringan pasar yang dapat dikembangkan guna mendukung kebutuhan layanan umum warga Desa Binai sangat baik. Keberadaan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar wilayah Desa Binai merupakan salah satu peluang pasar dan peluang mitra/jaringan yang menjanjikan. Diketahui bahwa jumlah perusahaan yang masih aktif beroperasi yaitu ada 9 (sembilan) perusahaan. Ke sembilan perusahaan ini merupakan potensi market yang sangat baik bagi BUMDes. Salah satu peluang usaha yang dapat digagas adalah usaha pemenuhan kebutuhan pokok bagi perusahaan. Hal ini dikemukakan oleh Ketua BPD Desa Binai sebagai berikut:

“perusahaan itu beroperasi diwilayah Desa Binai, jadi sebenarnya sangat mudah bagi kita jika kita menawarkan usaha kita melalui BUMDes untuk pemenuhan kebutuhan mereka, memang pernah saya dengar bahwa pengurus BUMDes sudah mencoba membuka komunikasi dengan pihak perusahaan, tapi katanya perusahaan mau bermitra dengan catatan mereka minta dokumen pendirian dan akta kepengurusan BUMDes sehingga



kedepannya dapat dijadikan sebagai dasar kerjasama, tapi ya itulah kondisi BUMDes kita, inipun belum ada Perdes pendiriannya, hanya SK Kepengurusan saja yang ada”.

Selain pernyataan tersebut diatas, juga menurut pengamatan/observasi peneliti, bahwa potensi untuk bermitra dengan pihak perusahaan sangat besar, hal ini didukung oleh informasi yang menyatakan bahwa pihak perusahaan juga selama ini sangat kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan bahan pokok, sehingga mau tidak mau pihak perusahaan dalam mensuplay kebutuhan bahan pokok mendatangkan dari luar Desa Binai, yaitu dari Tanjung Selor, dan dari desa-desa lainnya yang jarak tempuhnya sangat jauh yaitu kurang lebih 3 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda empat. Selain memakan waktu yang lama, tentunya biaya yang dikeluarkan pun sudah barang tentu lebih besar.

Melihat kondisi tersebut, seharusnya BUMDes dapat menangkap peluang sebagai suplayer/distributor yang dapat memenuhi segala kebutuhan pokok baik bagi masyarakat Desa Binai itu sendiri maupun bagi perusahaan yang ada di Wilayah Desa Binai. Selain kebutuhan bahan pokok, kebutuhan lainnya seperti kebutuhan bahan bakar minyak juga merupakan salah satu peluang yang juga bisa ditindak lanjuti.

6. Membuka lapangan kerja;

Kegiatan usaha dapat mencakup banyak hal/ jenis yang dapat digeluti, dan juga aktivitas usaha tentunya melibatkan banyak orang baik sebagai pemilik/pengelola usaha maupun sebagai konsumen. Semakin banyak jenis usaha dan aktivitas usaha akan berdampak akan kebutuhan tenaga kerja. Sangat disayangkan ketika Desa Binai dengan segala potensi dan peluang usaha yang dapat dikembangkan, namun pada kenyataannya peluang itu tidak dapat ditangkap dengan baik, karena banyak faktor. Sehingga *side effect* membuka lapangan pekerjaan pun tidak terwujud.

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;

Mencapai kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pencapaian tujuan kesejahteraan tersebut dimanifestasikan kedalam kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. BUMDes dapat dikatakan sebagai suatu konsep ideal yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan partisipatif/pemberdayaan masyarakat untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat sosial dan komersial. Artinya konsep BUMDes merupakan konsep usaha yang memiliki badan hukum formal yang tentunya dan seharusnya dikelola secara modern dan profesional.

Namun sangat disayangkan konsep ini masih dianggap sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat desa, hal demikian pun terjadi pada masyarakat Desa Binai yang menganggap BUMDes Mitra Abadi Sejahtera tidak memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sejalan dengan pernyataan salah satu warga atas nama Ibu Febriana Theresia dalam wawancara pada tanggal 04 Maret 2020, berikut:

“belum kelihatan aktivitas dan terobosan-terobosan BUMDes kita ini, kurang tau juga apa kegiatan mereka”

8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD);

Salah satu tujuan didirikannya BUMDes adalah meningkatkan pendapatan asli desa, namun hal ini dapat dikatakan hanya sebatas tujuan. Karena malah desa yang keluar modal sejumlah Rp. 100.000.000,- entah penggunaannya untuk apa dan keuntungan yang diperoleh berapa belum melaporkan ke pihak Desa. Hal ini disampaikan Pj Kepala Desa Bapak Tri Rubianto, S.Pd yang menyatakan bahwa:



“itulah susahnya di desa, kita minta laporan jawabannya gitu aja terus, masih dibuatlah, hilanglah dan seterusnya. Jadi sampai sekarang penggunaan dana Rp. 100.000.000,- belum ada laporannya, jangankan PAD meningkat, yang ada malah kita mengeluarkan modal”.

Berbagai persoalan dan dinamika yang terjadi tentunya dipengaruhi oleh banyak hal dan faktor, baik faktor yang berasal dari eksternal maupun faktor yang berasal dari internal BUMDes itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi dapat berupa faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Mitra Abadi Sejahtera Desa Binai berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.

1. Faktor Pendukung.

Faktor pendukung dapat diartikan sebagai potensi atau sumberdaya baik berupa materi maupun non materi yang dapat digunakan untuk mensupport aktivitas dalam pencapaian tujuan tertentu. Adapun faktor pendukung Eksistensi BUMDes Mitra Abadi Sejahtera yaitu berupa masih terbukanya potensi-potensi usaha yang jika dimanfaatkan dan dikelola dengan profesional tentunya dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah yang dapat mendukung percepatan kesejahteraan kehidupan masyarakat di Desa Binai. Selain faktor tersebut, dukungan berupa pemberian dana modal awal dari Desa sejumlah Rp. 100.000.000,- juga merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat besar. Selain itu, potensi Desa Binai berupa sumber daya alam (SDA) yang dimiliki desa yang dapat dikelola dan dikembangkan juga masih sangat luas. Desa Binai memiliki lahan pertanian kosong kurang lebih 2000 Ha yang sangat menguntungkan bagi BUMDes dan masyarakat petani untuk dimanfaatkan dalam kegiatan usaha seperti pertanian, perikanan dan lain sebagainya.

Namun demikian, terlepas dari adanya faktor pendukung tersebut di atas, mau tidak mau dan harus disadari bersama bahwa

Eksistensi BUMDes Mitra Abadi Sejahtera belum dapat menunjukkan geliat perubahan bagi masyarakat secara nyata. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor penghambat yang untuk saat ini perlu mendapatkan penanganan serius agar spirit awal pendirian BUMDes dapat segera terwujud.

2. Faktor Penghambat.

Eksistensi BUMDes dalam perjalanannya masih menemukan persoalan-persoalan yang muncul dan mempengaruhi, seperti yang dikemukakan Sutoro [12] dalam buku *Desa Membangun Indonesia*, yang menjelaskan beberapa faktor penghambat, yaitu :

- a. Kepemimpinan, Manajerial dan Tata Kelola (KMT),
- b. Jenis usaha,
- c. Skala dan Jangkauan Usaha,
- d. Emansipasi lokal,
- e. Tradisi Berdesa.

Berikut penjelasan masing-masing faktor tersebut:

- a. Kepemimpinan, Manajerial dan Tata Kelola (KMT)

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor utama yang dapat menentukan berhasil atau gagalnya suatu organisasi/lembaga seperti BUMDes. Di tangan pemimpinlah manajemen dan tata kelola dikendalikan. Kepemimpinan yang salah juga berdampak pada gagalnya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Pemimpin disini dapat diartikan sebagai Ketua BUMDes. Sebagai pemimpin pada umumnya, banyak hal yang disyaratkan khususnya berkaitan dengan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi. Namun demikian hal ini tidak dimiliki oleh Ketua BUMDes Mitra Abadi Sejahtera, Daniel Njuk. Berdasarkan data dan informasi yang peneliti dapatkan bahwa penunjukkan Daniel Njuk sebagai Ketua BUMDes didasarkan pada faktor ketokohan/orang yang dihormati/sepuh, bukan berdasarkan pada kemampuan manajerial. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor penghambat bagi pelaksanaan BUMDes dalam mencapai



tujuannya. Sejak awal berdirinya BUMDes pada tahun 2016 dengan SK dari Kepala Desa No. 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa, hingga saat ini masih belum menunjukkan indikasi adanya kemajuan dengan kata lain masih jalan di tempat, hal ini dilatar belakangi dengan berbagai hambatan diantaranya rasa tidak mampu dari pengurus BUMDes termasuk Ketua BUMDes.

b. Jenis Usaha.

Jenis usaha yang digeluti oleh lembaga usaha seperti BUMDes tentunya harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasar. Banyak potensi yang dapat diperoleh untuk mengembangkan berbagai jenis usaha di Desa Binai yang tidak dapat dilaksanakan oleh BUMDes Mitra Abadi Sejahtera. Jenis usaha dimaksud seperti distributor bahan pokok bagi masyarakat dan perusahaan, sektor pertanian, perikanan dan lain-lain.

c. Skala dan jangkauan usaha.

Keberlanjutan dan Eksistensi BUMDes sangat dipengaruhi oleh skala dan jangkauan usaha. BUMDes menjalankan usaha dalam skala kecil sehingga harus betul-betul dikelola dengan sumber daya dan manajemen yang memadai, karena jika tidak dengan skala dan jangkauan yang kecil tentunya kurang memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat setempat.

d. Emansipasi lokal.

Sejatinya BUMDes berdiri karena kebutuhan dan partisipasi/emansipasi masyarakat lokal dimana BUMDes itu berada. Namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa masih banyak BUMDes yang didirikan bukan merupakan perwujudan dari emansipasi lokal, namun lebih cenderung sebagai paket instruksional dari pemerintah daerah saja. Alhasil BUMDes hanya sekedar nama tanpa aktivitas yang nyata ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

e. Tradisi berdesa.

Tradisi berdesa ditandai dengan adanya hubungan hangat antar warga masyarakat yang

selama ini memang dikenal kental dalam kehidupan masyarakat desa. Salah satunya yaitu gotong royong dan partisipasi. Potensi ini sudah mulai luntur seiring berkembangnya zaman dan masuknya budaya luar melalui media-media yang dapat dijangkau sebagian besar masyarakat. Kondisi ini juga yang menjadi salah satu penyebab penghambat dalam Eksistensi BUMDes Mitra Abadi Sejahtera Desa Binai.

Selain faktor tersebut di atas, berdasarkan hasil penelitian ditemukan faktor lainnya yang juga berpengaruh sebagai penghambat dalam eksistensi BUMDes Mitra Abadi Sejahtera, yaitu:

- a. Tidak ada pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas terkait, sehingga kondisi dilapangan kurang terkontrol.
- b. Tidak Adanya Mitra BUMDes Mitra Abadi Sejahtera.

Untuk menjaga keberlangsungan BUMDes sudah menjadi keharusan dapat membangun jejaring dengan seluas-luasnya, baik itu masyarakat umum, perusahaan maupun pemerintah desa lainnya. Namun demikian dalam hal ini, Badan Usaha Milik Desa Mitra Abadi Sejahtera belum mampu menjalin hubungan dengan pihak manapun dikarenakan status kelembagaan berupa aturan pembentukan yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUMDes dibentuk melalui Peraturan Desa, namun demikian sampai pada penelitian ini dilaksanakan, tidak ada Peraturan Desa Binai tentang Pembentukan BUMDes Mitra Abadi Sejahtera, namun yang ada hanya Surat Keputusan Kepala Desa No. 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa. Ini juga menjadi salah satu



indikasi minimnya pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia baik pada pengelola BUMDes itu sendiri maupun pada Pemerintah Desa Binai. Selain faktor dasar hukum pembentukan tersebut di atas, faktor proaktif Pemerintah Desa Binai yang dinilai tidak dapat membukakan akses/jalan awal untuk bermitra dengan pihak perusahaan yang ada juga menjadi salah satu faktor penghambat untuk membentuk jejaring dalam upaya menghidupkan aktivitas BUMDes.

c. Ketidakhahaman Masyarakat tentang BUMDes (kurangnya sosialisasi pihak terkait).

Konsep BUMDes yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDPT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dan peraturan-peraturan turunan lainnya sudah sangat jelas dan gamblang menjelaskan konsepsi BUMDes.

Hal ini tentunya dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah desa dan/atau pengelola BUMDes untuk mensosialisasikan lebih dalam kepada masyarakat. Namun demikian seolah tidak dilaksanakan, sehingga mengindikasikan bahwa pendirian BUMDes Mitra Abadi Sejahtera merupakan hanya sekedar paket instruksional dari pemerintah daerah, bukan merupakan inisiasi yang datang dari masyarakat itu sendiri. Hal ini juga berdampak pada kurangnya dukungan yang diberikan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan aktivitas BUMDes.

d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Desa untuk Mengelola dan Mengembangkan BUMDes yang Berkinerja Baik.

Suksesnya suatu usaha khususnya Badan Usaha Milik Desa dapat dilihat dari tingkat keberhasilan yang di capai oleh BUMDes. Tingkat keberhasilan ini dapat tercapai apabila tersedianya sumberdaya manusia yang memadai, pengembangan sumberdaya manusia ini sangat penting dalam menunjang dan mengelola suatu lembaga atau organisasi.

Karena sumberdaya manusia menjadi salah satu organ vital yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi untuk keberlanjutan organisasi tersebut, dengan adanya sumberdaya manusia tersebut maka dapat menentukan keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Keterbatasan SDM yang mumpuni di Desa Binai yang mau terlibat aktif dalam pengelolaan BUMDes merupakan salah satu faktor besar penyumbang BUMDes Mitra Abadi Sejahtera kurang berkembang. Keterbatasan pengetahuan dan wawasan tentang BUMDes bagi pengelola yang ada, juga mekanisme penunjukkan pengelola yang tidak didasarkan pada pertimbangan kemampuan, melainkan lebih pada pertimbangan subjektifitas seperti ketokohan, dan seterusnya sangat mempengaruhi terhadap keberlangsungan organisasi, hal ini terbukti dengan ketidakseriusan dan ketidakprofesionalan pengelola/pengurus dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Mitra Abadi Sejahtera.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. BUMDes Mitra Abadi Sejahtera Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan merupakan salah satu BUMDes yang mulai awal berdirinya pada tahun 2016 belum banyak menunjukkan indikasi keberhasilan yang dicapai. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pencapaian tujuan yang masih rendah. Hal-hal yang dijadikan indikator dalam penelitian ini yaitu tujuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDPT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, khususnya Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. Meningkatkan Perekonomian Desa;



- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
 - c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
 - d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
 - e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. Membuka lapangan kerja;
 - g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
 - h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD);
2. Banyak faktor yang mempengaruhi Eksistensi BUMDes Mitra Abadi Sejahtera dalam proses aktivitasnya, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung.

Faktor pendukung dapat diartikan sebagai potensi atau sumberdaya baik berupa materi maupun non materi yang dapat digunakan untuk mensupport aktivitas dalam pencapaian tujuan tertentu. Adapun faktor pendukung Eksistensi BUMDes Mitra Abadi Sejahtera yaitu berupa masih terbukanya potensi-potensi usaha yang jika dimanfaatkan dan dikelola dengan profesional tentunya dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah yang dapat mendukung percepatan kesejahteraan kehidupan masyarakat di Desa Binai. Selain faktor tersebut, dukungan berupa pemberian dana modal awal dari Desa sejumlah Rp. 100.000.000,- juga merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat besar. Selain itu, potensi Desa Binai berupa sumber daya alam (SDA) yang dimiliki desa yang dapat dikelola dan dikembangkan juga masih sangat luas. Desa Binai memiliki lahan pertanian kosong

kurang lebih 2000 Ha yang sangat menguntungkan bagi BUMDes dan masyarakat petani untuk dimanfaatkan dalam kegiatan usaha seperti pertanian, perikanan dan lain sebagainya.

Namun demikian, terlepas dari adanya faktor pendukung tersebut di atas, mau tidak mau dan harus disadari bersama bahwa Eksistensi BUMDes Mitra Abadi Sejahtera belum dapat menunjukkan geliat perubahan bagi masyarakat secara nyata. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor penghambat yang untuk saat ini perlu mendapatkan penanganan serius agar spirit awal pendirian BUMDes dapat segera terwujud.

Faktor Penghambat.

Eksistensi BUMDes dalam perjalanannya masih menemukan persoalan-persoalan yang muncul dan mempengaruhi, seperti yang dikemukakan [12] dalam buku *Desa Membangun Indonesia*, yang menjelaskan beberapa faktor penghambat, yaitu :

- a. Kepemimpinan, Manajerial dan Tata Kelola (KMT),
- b. Jenis usaha,
- c. Skala dan Jangkauan Usaha,
- d. Emansipasi lokal,
- e. Tradisi Berdesa.

Selain faktor tersebut di atas, berdasarkan hasil penelitian ditemukan faktor lainnya yang juga berpengaruh sebagai penghambat dalam eksistensi BUMDes Mitra Abadi Sejahtera, yaitu:

- a. Tidak ada pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas terkait, sehingga kondisi dilapangan kurang terkontrol.
- b. Tidak Adanya Mitra BUMDes Mitra Abadi Sejahtera.

Untuk menjaga keberlangsungan BUMDes sudah menjadi keharusan dapat membangun jejaring dengan seluas-luasnya, baik itu masyarakat umum, perusahaan maupun pemerintah desa lainnya. Namun demikian dalam



hal ini, Badan Usaha Milik Desa Mitra Abadi Sejahtera belum mampu menjalin hubungan dengan pihak manapun dikarenakan status kelembagaan berupa aturan pembentukan yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUMDes dibentuk melalui Peraturan Desa, namun demikian sampai pada penelitian ini dilaksanakan, tidak ada Peraturan Desa Binai tentang Pembentukan BUMDes Mitra Abadi Sejahtera, namun yang ada hanya Surat Keputusan Kepala Desa No. 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa. Ini juga menjadi salah satu indikasi minimnya pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia baik pada pengelola BUMDes itu sendiri maupun pada Pemerintah Desa Binai.

Selain faktor dasar hukum pembentukan tersebut di atas, faktor proaktif Pemerintah Desa Binai yang dinilai tidak dapat membukakan akses/jalan awal untuk bermitra dengan pihak perusahaan yang ada juga menjadi salah satu faktor penghambat untuk membentuk jejaring dalam upaya menghidupkan aktivitas BUMDes.

- c. Ketidakhahaman Masyarakat tentang BUMDes (kurangnya sosialisasi pihak terkait).

Konsep BUMDes yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dan peraturan-peraturan turunan lainnya sudah sangat

jelas dan gamblang menjelaskan konsepsi BUMDes. Hal ini tentunya dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah desa dan/atau pengelola BUMDes untuk mensosialisasikan lebih dalam kepada masyarakat. Namun demikian seolah tidak dilaksanakan, sehingga mengindikasikan bahwa pendirian BUMDes Mitra Abadi Sejahtera merupakan hanya sekedar paket instruksional dari pemerintah daerah, bukan merupakan inisiasi yang datang dari masyarakat itu sendiri. Hal ini juga berdampak pada kurangnya dukungan yang diberikan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan aktivitas BUMDes.

- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Desa untuk Mengelola dan Mengembangkan BUMDes yang Berkinerja Baik.

Suksesnya suatu usaha khususnya Badan Usaha Milik Desa dapat dilihat dari tingkat keberhasilan yang di capai oleh BUMDes. Tingkat keberhasilan ini dapat tercapai apabila tersedianya sumberdaya manusia yang memadai, pengembangan sumberdaya manusia ini sangat penting dalam menunjang dan mengelola suatu lembaga atau organisasi. Karena sumberdaya manusia menjadi salah satu organ vital yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi untuk keberlanjutan organisasi tersebut, dengan adanya sumberdaya manusia tersebut maka dapat menentukan keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Keterbatasan SDM yang mumpuni di Desa Binai yang mau terlibat aktif dalam pengelolaan BUMDes merupakan salah satu faktor besar penyumbang BUMDes Mitra Abadi Sejahtera kurang berkembang. Keterbatasan pengetahuan dan wawasan tentang BUMDes bagi pengelola yang ada, juga mekanisme penunjukkan



pengelola yang tidak didasarkan pada pertimbangan kemampuan, melainkan lebih pada pertimbangan subjektifitas seperti ketokohan, dan seterusnya sangat mempengaruhi terhadap keberlangsungan organisasi, hal ini terbukti dengan ketidakseriusan dan ketidakprofesionalan pengelola/pengurus dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Mitra Abadi Sejahtera.

Saran

Saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan pengelolaan BUMDes Mitra Abadi Sejahtera dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pendirian BUMDes harus betul-betul berdasarkan kajian atau analisis potensi dan kebutuhan yang nyata. Kebutuhan yang datang dari masyarakat desa. Selain itu pendirian BUMDes juga harus dilandasi dengan dasar hukum yang sesuai aturan, sehingga dalam perjalanannya tidak mengalami permasalahan administrasi yang dapat menghambat gerak dari BUMDes itu sendiri.
2. Memastikan seluruh informasi berkaitan dengan BUMDes tersampaikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat, hal ini penting sebagai modal untuk meningkatkan partisipasi mengingat objek dan subjek dari BUMDes adalah masyarakat itu sendiri.
3. Pemerintah daerah melalui dinas terkait diharapkan meningkatkan kepedulian terhadap pembinaan dan pendampingan BUMDes di wilayah nya, sehingga kualitas sumber daya manusia pengurus selalu meningkat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada.
4. Pemerintah desa dapat melakukan pembinaan dengan cara bermitra dengan pihak lain seperti akademisi maupun lembaga yang konsen terhadap pembangunan desa khususnya pengembangan BUMDes.
5. Pihak swasta dapat berkontribusi kepada BUMDes melalui banyak hal, seperti CSR ataupun sebagai konsumen tetap dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan operasional perusahaannya.
6. Masyarakat sudah saatnya memiliki semangat berubah yang tinggi, ikut terlibat aktif dalam BUMDes sebagai wujud kepedulian terhadap kemajuan bersama dan memajukan desanya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonym, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- [2] Abidin, Zainal.2007. *Analisis Eksistensial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad.
- [3] Anonym, 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.
- [4] Anonym, 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.
- [5] Dapartemen Pendidikan Nasional, 2007. *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- [6] Harmiati dan Abdul Aziz Zulkhakim, 2013. *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengembangkan usaha dan ekonomi Masyarakat Desa yang berdaya saing di era MEA*, <http://setnas-asean.id/site/uploads/document/journals/file/59b0f03a8a119-14-cluster-ekonomi-unihaz.pdf> tanggal 10 Agustus 2019, Jam 11.22 Wita.
- [7] Nofiratullah, 2018. *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima*. <http://etheses.uin->



-
- malang.ac.id/11809/ pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 11.30 Wita.
- [8] Ferdianto. Benny, 2016. *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat*. http://digilib.unila.ac.id/view/creators/BNNY_FERDIANTO=3A1212011068=3A=3A.html pada tanggal 12 Agustus 2019 pukul 15.00 Wita.
- [9] Idrus. Muhammad, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial – Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi Kedua, Erlangga, Yogyakarta.
- [10] Sugiono, 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan Ke-21 ISBN : 978-979- 8433-10-8. Bandung : Penerbit CV. ALFABETA.
- [11] Miles, Mathew B. Michael Huberman dan Johnny Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis-Third Edition*, London, Sage Publication Ltd.
- [12] Sutoro, Eko. 2014. *Desa Membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*. Yogyakarta.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN